



BUKU AJAR

AKUNTANSI PEMERINTAH

Syahrijal Hidayat, S.E., M.Ak

Buku Ajar
AKUNTANSI PEMERINTAH

Syahrijal Hidayat, S.E., M.Ak



PT Inovasi Pratama Internasional

Akuntansi Pemerintah

Penulis:

Syahrijal Hidayat, S.E., M.Ak

ISBN:

.....

Editor:

Bincar Nasution, S.Pd., C.Mt

Penyunting:

Anita Safitri Nasution, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak :

InoVal

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional

Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:

PT Inovasi Pratama Internasional

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725

Telp. +628 5360 415005

Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, September 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah adalah salah satu disiplin ilmu di bidang akuntansi yang sekarang ini sedang berkembang cukup pesat di sektor pemerintah. Tuntutan adanya transparansi dan juga kredibilitas serta akuntabilitas publik atas kemana dana dari masyarakat dialokasikan, membuat pemerintah akan memunculkan informasi dari pemakaian dana masyarakat dalam laporan akuntansi yang mencatat dan juga melaporkan kinerja keuangan pemerintah.

Akuntansi pemerintah sendiri tidak terlepas dari pemahaman dan juga pengertian mengenai disiplin ilmu akuntansi dan juga perkembangannya di Indonesia. Sementara pemerintah sendiri memiliki arti sebagai lembaga politik yang menonjol dan aspek ekonomi yang tidak bisa dikesampingkan.

Laporan keuangan adalah laporan yang tersusun dan terstruktur dimana berisi laporan mengenai keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan tersebut laporan keuangan ini adalah bentuk dari pertanggung jawaban kepengurusan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh entitas. Laporan tersebut akan dirilis sesuai dasar standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar bisa dibandingkan dengan laporan-laporan keuangan di periode terdahulu.

Laporan keuangan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna seperti akuntan yang akan melihat laporan tersebut dalam sajian terpisah dan juga menjadi bagian laporan keuangan guna menyajikan informasi mengenai sumber daya yang diperlukan bagi operasi yang berkelanjutan, posisi keuangan dan juga kinerja. Unsur yang terdapat dari laporan keuangan adalah aset, kewajiban, ekuitas dan juga kinerja serta penghasilan dan beban, penyesuaian laba dan rugi perusahaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan juga dimiliki oleh pemerintah yang terjadi akibat dari peristiwa masa lalu dan juga manfaat dari ekonomi serta sosial di masa depan yang bisa diperoleh baik pemerintah dan juga masyarakat. Dan aset bisa ditukar dengan uang dimana sumber daya non keuangan juga

dibutuhkan untuk penyediaan jasa untuk masyarakat umum dan juga sumber daya yang dipelihara disebabkan sisi budaya dan juga sejarah. Aset menjadi salah satu komponen yang nilainya cukup penting di dalam neraca sebuah entitas. Penyajian dan pengungkapan informais aset tersebut menjadi sangat penting untuk sebuah instansi perusahaan dan juga organisasi nirlaba.

Dasar hukum penyajian aset di pemerintahan ini yaitu UU No. 1/2204 yang berisi Perbendaharaan Negara. Ruang lingkup Perbendaharaan Negara ini terdapat 1) pelaksanaan pendapatan dan juga belanja negara, 2) pelaksanaan pendapatan dan juga belanja daerah, 3) pelaksanaan dan pengeluaran penerimaan negara, 4) pelaksanaan dan pengeluaran belanja negara, 5) pengelolaan kas negara, 6) pengelolaan hutang dan piutang dari negara dan daerah, 7) pengelolaan investasi dan juga barang milik negara dan daerah, 8) penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi keuangan negara dan daerah, 9) penyusunan laporan pertanggung jawaban APBN dan APBD, 10) penyelesaian kondisi kerugian di daerah dan negara, 11) pengelolaan Badan Layanan Umum, 12) perumusan standard, kebijakan dan juga prosedur serta sistem yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.

Undang-undang merupakan pedoman dan juga acuan guna menyusun neraca yang menjadi laporan dalam urusan pelaporan posisi keuangan yang terdiri dari aset, hutang dan juga kekayaan di sebuah tanggal tertentu. Komponen utama yang ada di dalam neraca merupakan aset tetap dan juga barang milik negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan juga daerah.

Berdasarkan pengalaman pemerintah kala menyusun neraca dan juga komponen aset tersebut merupakan hal yang cukup sulit guna diakui terkait dengan banyaknya jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah didalamnya aset budaya dan juga sejarah. Begitu pula dengan aset infrastruktur dan juga kemiliteran dimana membutuhkan perlakuan akuntansi yang spesifik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia buku yang berjudul “Akuntansi Pemerintah” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Akuntansi Pemerintah.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia baik itu mahasiswa, dosen, guru, praktisi dan peneliti.

Medan, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
BAB 1	
LATAR BELAKANG AKUNTANSI PEMERINTAH.....	1
LATAR BELAKANG	1
KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAH DAN TUJUANNYA	2
RUANG LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAH.....	3
BAB 2	
PENCATATAN KEUANGAN NEGARA.....	4
LATAR BELAKANG	4
KEUANGAN NEGARA	5
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL	7
SAP BERBASIS AKRUAL.....	9
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SAP BASIS AKRUAL.....	10
URAIAN MENGENAI LAPORAN SAP BERBASIS AKRUAL	11
PENERAPAN SAP AKRUAL	13
BAB 3	
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH	14
PRINSIP AKUNTANSI	14
STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSI SETOR PUBLIK	15
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH.....	15
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH.....	18
STRATEGI PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI PADA NEGARA BERKEMBANG	20
TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH...	21
BAB 4	
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	26
TUJUAN PELAPORAN BERDASARKAN SFAC.....	26
PERLUNYA INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	26
TEORI LAPORAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK.....	27
TIPE LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK.....	28
SISTEM LAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH.....	31
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH	33
BAB 5	
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	35
PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	35

LATAR BELAKANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.....	36
KLASIFIKASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.....	37
DASAR HUKUM PELAKSANAAN SAPP	39
SISATEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA.....	41
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT.....	41
BAB 6	
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	43
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENGALAMI PERBARUAN	43
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	44
PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.....	46
PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	52
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	53
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB 1

LATAR BELAKANG AKUNTANSI PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa untuk menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan reformasi yang semakin hari semakin meningkat, tentu berpengaruh kepada semua bidang. Tidak terkecuali akuntansi. Berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tentu saja akuntansi semakin dibutuhkan bukan hanya untuk pihak manajemen entitas tertentu, namun juga sebagai akuntabilitas kepada semua pihak yang membutuhkan. Di dunia bisnis, akuntansi memiliki peran yang sangat penting. Dan sekarang ini sudah berkembang seiring dengan dunia bisnis yang terus berkembang mengikuti jaman.

Sementara perkembangan dunia akuntansi pemerintahan tidak secepat dunia bisnis yang terus bergerak dan juga berubah. Hal ini disebabkan dengan karakteristik yang seolah berjalan di tempat dan tidak mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat tentu saja membuat akuntansi pemerintah harus lebih baik dan juga berubah mengikuti jaman. Apalagi semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, membuat tuntutan akuntabilitas keuangan yang menjadi perwujudan transparansi keuangan di dalam pemerintahan harus lebih baik.

Akuntansi pemerintahan bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan pelayanan jasa guna menyajikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengedepankan proses pencatatan, klasifikasi, ikhtisar dan juga transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran dari informasi keuangan tersebut.

Definisi tersebut tidak berbeda jauh dengan definisi akuntansi pada umumnya. Perbedaan yang terjadi hanya pada jenis transaksi yang digunakan dan juga proses pencatatannya serta pengguna dari akuntansi tersebut. Jenis yang dicatat di dalam akuntansi pemerintah ini yaitu transaksi keuangan milik pemerintah. Sementara pengguna dari akuntansi secara umum yaitu rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif, pemerintah dan kreditor seperti IMF, ABD dan juga lembaga-lembaga lainnya.

Kebutuhan akuntansi pemerintah sekarang ini semakin besar yang membuat ilmu akuntansi menambahkan kurikulum akuntansi pemerintah sebagai salah satu bagian dari disiplin ilmu dari akuntansi.

Dan hal ini tentu saja membuat disiplin ilmu akuntansi menjadi lebih variatif.

Ruang lingkup akuntansi memiliki 2 bagian yang terdiri dari akuntansi mikro dan juga makro. Akuntansi mikro terdiri dari akuntansi pemerintahan dan juga bisnis. Sementara akuntansi makro terdiri dari akuntansi sosial dan juga akuntansi nasional.

B. KARAKTERISTIK AKUNTANSI PEMERINTAH DAN TUJUANNYA

Pemerintah merupakan bentuk organisasi sektor publik yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat sebagai tujuan umum. Guna mewujudkan tujuan tersebut, tentu ada aturan umum yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan konstitusi dan juga undang-undang dasar serta peraturan perundang-undangan lain.

Oleh sebab itu perbedaan perlakuan akuntansi pemerintahan dan juga bisnis berdasarkan pengukuran kinerja, membuat kedua aspek ini mempunyai tujuan yang terdiri dari:

1. Akuntabilitas

Fungsi ini memiliki peran yang lebih luas dari hanya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Namun menjadi perhatian bagi penggunaan sumber daya yang digunakan secara bijaksana, efisien dan juga ekonomis serta efektif.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah memberikan kemungkinan bagi pemerintah guna menjalankan fungsi manajerial dalam merencanakan dan menyusun anggaran negara atau APBN dan juga strategi di sektor pembangunan

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintah dibuat guna mengawasi proses keuangan negara agar bisa diperiksa dengan mudah oleh lembaga-lembaga keuangan seperti BPK.

Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis. Karakteristik akuntansi pemerintah memiliki ciri sebagai berikut:

1. Tidak ada laporan laba pada akuntansi pemerintah
2. Membukukan anggaran saat anggaran tersebut sudah dibukukan
3. Akuntansi pemerintah bisa memakai dana lebih dari 1 jenis

4. Pembukuan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan juga hasil operasional.
5. Memiliki sifat yang *rigid* disebabkan ketergantungan kepada peraturan perundang-undangan.
6. Tidak ada perkiraan modal dan juga laba ditahan di dalam neraca keuangan tersebut.
7. Informasi keuangan disajikan dengan detail termasuk hasil operasi
8. Prinsip standar akuntansi menjadi standar umum
9. Mengembangkan prinsip standar akuntansi
10. Memakai sistem bagan standard.

C. RUANG LINGKUP AKUNTANSI PEMERINTAH

Perkembangan akuntansi pemerintah memang tidak secepat dunia akuntansi bisnis. Hal ini tentu saja disebabkan karakteristik yang berbeda dengan akuntansi bisnis tersebut yang tidak banyak terjadi perubahan di dalamnya. Tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya laporan keuangan, membuat akuntansi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan juga laporan keuangan.

Perbedaan perlakuan akuntansi pemerintah dan juga akuntansi bisnis ini bertujuan untuk mengukur kinerja dari lembaga keuangan tersebut. Meski memiliki tujuan yang berbeda, namun secara hakikat bahwa tujuan dari akuntansi pemerintah dan bisnis adalah menyajikan informasi keuangan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi tersebut.

BAB 2

PENCATATAN KEUANGAN NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Akuntansi pemerintah belum banyak terjadi perubahan dan juga perkembangan semenjak kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan sisi historis, produk akuntansi pemerintah Indonesia yang pertama adalah neraca kekayaan negara yang dirilis pada tahun 1948. Dan bentuk akuntabilitas keuangan negara ini menggunakan bahasa Belanda dan juga mata uang Belanda.

Perubahan pada akuntansi pemerintah baru terjadi pada tahun 2003 yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 dan menggantikan akuntansi peninggalan Belanda. Undang-undang mengenai keuangan negara tersebut menjadi salah satu pedoman yang cukup penting guna perkembangan dunia akuntansi pemerintah di Indonesia.

Undang-undang keuangan negara ini disempurnakan dengan UU No. 1 th 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dan juga UU No 15 tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dari ketiga Undang-undang tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintah menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat.

Sebelum adanya peraturan Undang-undang tersebut, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan pencatatan tunggal atau *single entry* dengan memakai sistem *cash basis*. Akuntansi pemerintah pada masa-masa tersebut menyajikan sistem sederhana dan menggunakan buku-buku seperti buku kas umum, buku kas tunai, buku bank hingga buku pengawasan desa dan juga kredit anggaran serta buku lain.

Akuntansi dengan basis kas memang memiliki sistem penerapan yang cukup sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Praktis tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami dan juga mengerjakannya. Akuntansi berbasis kas ini memiliki kekurangan seperti informasi yang kurang disebabkan informasi mengenai penerimaan, saldo kas, pengeluaran dan juga aset dan kewajiban tidak tersaji dengan maksimal.

Keuangan negara tentu saja harus menyajikan aset yang dimiliki oleh pemerintah dan juga neraca yang esaji dengan lengkap. Dan untuk meminimalisir kelemahan di sektor akuntansi tersebut, maka peraturan yang baru dikeluarkan guna menerapkan akuntansi dengan basis akrual di setiap instansi pemerintah. Baik pemerintah

pusat dan juga pemerintah daerah. Pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa Pengakuan dan juga pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual bisa dilaksanakan paling lambat 5 tahun. Dan dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya UU tersebut, maka pemerintah harus menggunakan akuntansi dengan basis akrual.

Dasar hukum dari akuntansi pemerintah adalah UU No. 1 tahun 2004 pada pasal 51 yang terdiri dari:

1. Menteri keuangan menjadi penyelenggara dari akuntansi dengan transaksi keuangan, aset dan utang serta ekuitas dana. Termasuk di dalamnya adalah pembiayaan dan juga perhitungan di setiap transaksinya.
2. Menteri dan juga pimpinan lembaga yang menjadi pengguna anggaran negara tersebut dan juga penyelenggara akuntansi dari transaksi keuangan, aset, utang dan juga ekuitas dana yang didalamnya terdapat pendapatan dan juga belanja yang masuk ke dalam tanggung jawab para pemimpin lembaga tersebut.
3. Akuntansi yang ada di ayat (1) dan juga ayat (2) difungsikan untuk menyusun laporan keuangan dari pemerintah baik di sektor pusat dan juga daerah yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. KEUANGAN NEGARA

Keuangan negara memiliki pengertian sebagai pengelolaan dan pengurusan keuangan negara yang mempunyai arti cukup luas yaitu pengurusan keuangan negara yang juga manajemen keuangan negara. Sementara untuk arti sempit dari keuangan negara ini yaitu pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari administrasi keuangan negara dan juga tata usaha negara.

Berdasarkan penuturan Suparmoko (2000: 5), dikatakan bahwa keuangan negara yaitu bagian dari disiplin ilmu perekonomian yang belajar mengenai kegiatan pemerintah di sektor ekonomi dan juga penerimaan dan pengeluaran keuangan yang mempunyai pengaruh besar kepada sektor perekonomian tersebut.

Pengaruh ini seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan juga distribusi penghasilan yang merata. Begitu pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan juga hal-hal lainnya. Di dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 yang mengatur tentang Keuangan Negara ini menyatakan bahwa keuangan negara

merupakan semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang dan juga barang yang bisa menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ada pendekatan yang dilakukan dalam upaya merumuskan keuangan negara yang terdiri dari beberapa sisi sebagai berikut:

1. Obyek

Dari sisi obyek disebutkan bahwasanya keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban milik negara yang dinilai dengan uang, kebijakan, kegiatan yang termasuk di dalam bidang moneter, fiskal hingga kekayaan negara yang dikelola dan dipisahkan. Dan semua hal yang berupa barang dan uang ini bisa menjadi milik negara dengan pelaksanaan hak dan juga kewajiban tersebut.

2. Subyek

Sementara dari sisi subyek sendiri memiliki maksud bahwa keuangan negara yang terdiri dari semua obyek yang dikuasai oleh negara baik di pemerintah pusat dan daerah, memiliki kaitan yang erat dengan keuangan negara.

3. Proses

Keuangan negara adalah semua kegiatan yang memiliki kaitan erat dengan pengelolaan obyek keuangan negara yang berasal dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan juga pertanggung jawaban pemerintah.

4. Tujuan

Keuangan negara berdasarkan tujuan mempunyai arti bahwa semua kegiatan dan juga kebijakan yang memiliki hubungan hukum dan memiliki kaitan erat atas pemilikan serta penguasaan obyek dari keuangan negara.

Keuangan negara tersebut meliputi semua kewajiban dan juga hak dari negara yang dinilai dengan uang. Dan perlu dipahami lebih dalam bahwa hak dan kewajiban tersebut apakah bisa dinilai dengan uang atau tidak. Hak negara yang bisa dinilai dengan uang yang terdiri antara lain:

1. Hak yang bisa dipaksa guna menarik uang dan juga barang dari warga negara tanpa adanya balasan jasa dan imbalan. Penarikan ini seperti pajak, bea cukai, iuran dan juga retribusi dan lainnya.
2. Hak untuk melakukan monopoli dalam mencetak uang serta menentukan jenis mata uang tersebut.
3. Hak guna menarik pinjaman dari masyarakat yang bisa berupa paksaan seperti sanering atau pemotongan nilai

dan juga devaluasi atau penurunan nilai dari mata uang negara.

4. Hak guna menguasai semua wilayah dan juga kekayaan yang terkandung di dalamnya meliputi wilayah darat, laut dan udara.

Selain hak, kewajiban negara yang bisa dinilai dengan mata uang terdiri dari:

1. Kewajiban menyediakan barang dan jasa yang berguna untuk kepentingan umum. Barang dan jasa ini terdiri dari:
 - a. Penyediaan keamanan dan juga pertahanan negara
 - b. Pembuatan serta pemeliharaan jaringan transportasi publik untuk masyarakat.
 - c. Penyediaan jasa pendidikan, pembangunan fasilitas pendidikan dan jasa guru
 - d. Penyediaan dunia kesehatan untuk masyarakat
 - e. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sosial dan juga perlindungan sosial untuk masyarakat
2. Kewajiban dalam membayar tagihan dari pihak yang melakukan sesuatu bagi pemerintah dan juga mengikat perjanjian dengan pemerintah. Pembelian barang dan jasa yang memberikan keuntungan untuk pemerintah. Seperti hubungan jual beli antara pemerintah dan warga negara.

Kewajiban negara secara umum sebenarnya sudah tertera secara jelas pada teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada alinea ke-4. Dan sudah banyak ahli tata negara yang mengatakan bahwasanya perincian dalam alinea tersebut adalah tujuan negara guna mensejahterakan warganya. Seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan juga melaksanakan ketertiban dunia dengan asas kemerdekaan dan juga perdamaian.

C. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP yang dahulu berbasis dengan kas, sekarang dirubah menjadi standar yang berbasis Akruwal. Standar akuntansi ini mencatat pendapatan dan juga belanja serta pembiayaan dengan basis kas. Selain itu pengakuan akan aset, utang dan juga ekuitas dana yang menggunakan basis akrual, menjadi standar dari akuntansi pemerintah.

Basis kas akrual ini akan mencatat semua penggunaan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran ini diakui ketika kas masuk ke

dalam Kas Negara dan juga pencatatan belanja juga diakui ketika kas keluar dari Kas Negara. Setiap akhir periode harus dilakukan penyesuaian guna mencatat belanja harta tetap yang dilakukan di periode pelaksanaan.

Basis kas guna pendapatan dan belanja ini dilakukan pada periode anggaran yang akan menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran atau LRA dan juga Laporan Arus Kas atau LAK. Sementara pencatatan di akhir periode akan didapatkan Neraca. Di dalam neraca ini terdapat unsur seperti aset, ekuitas dana dan juga kewajiban. Sementara pendapatan, belanja dan juga pembiayaan masuk ke dalam unsur Laporan Realisasi Anggaran. Neraca akan disajikan dengan basis akrual sementara LRA akan disajikan dengan sistem kas.

Penerapan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah dengan basis Akrual ini dilakukan secara bertahap di sektor pusat. Dan hal ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai penerapan SAP dengan basis Akrual ini dilakukan secara bertahap pula di sektor daerah yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Terdapat perbedaan mendasar diantara SAP dengan basis kas dan juga SAP dengan basis akrual yang terdapat pada PSAP 12 yang berisi laporan operasional. Entitas yang melaporkan sumber daya ekonomi tersebut dilakukan secara transparan dan beban yang ditanggung guna menjalankan roda pemerintahan. Surplus dan juga defisit dari operasional tersebut adalah penambah dan pengurang ekuitas atau kekayaan bersih dari entitas pemerintah yang bersangkutan, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Laporan Realisasi Anggaran dan juga neraca adalah laporan yang memiliki hubungan diantara kedua aspek tersebut. Pendapatan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran ini akan didefinisikan sebagai penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara dan juga Daerah yang akan menambah ekuitas dana lancar di dalam periode tahun anggaran.

Ekuitas dana lancar menjadi salah satu unsur neraca yang termasuk ke dalam pendapatan dan juga belanja yang akan mempengaruhi secara langsung ekuitas dana lancar yang tertera dalam neraca keuangan. Namun penerimaan pendapatan dan juga pengeluaran belanja yang berbasis kas tentu saja hanya memberikan pengaruh kepada jumlah kas. Akan tetapi tidak secara langsung akan memberikan pengaruh kepada ekuitas dana lancar.

Penerimaan pendapatan akan dicatat lebih dulu pada akun pendapatan dan juga pengeluaran pada akhir tahun yang akan ditutup ke akun ekuitas dana lancar tersebut. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah juga harus tersedia di dalam anggaran yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran tersebut.

Unsur dari Laporan Realisasi Anggaran dicatat dan diakui ketika kas diterima dan dikeluarkan yang berarti mencakup semua pendapatan, belanja dan juga pembiayaan pemerintah. Ketiga unsur tersebut akan memberikan pengaruh kepada kas, namun tidak mempengaruhi aspek lain yang ada di dalam pos neraca ketika melakukan penerimaan dan pengeluaran dari kas tersebut. Dengan sistem ini, neraca hanya terdiri dari 2 sisi yang terdiri dari debit kas dan kredit ekuitas. Dan ekuitas tersebut akan muncul pada periode terakhir kala pendapatan dan biaya akan ditutup ke dana lancar.

D. SAP BASIS AKRUAL

SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui bahwa pendapatan, beban, utang, aset dan juga ekuitas di dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual, dan mengakui bahwa pendapatan dan belanja serta pembiayaan di pelaporan pelaksanaan anggaran dengan basis yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pasal 1 ayat (8).

SAP dengan menggunakan basis akrual ini bisa diterapkan di sistem pemerintah baik pemerintah pusat, daerah dan juga satuan organisasi yang berada di lingkungan pemerintah tersebut. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan bahwa satuan organisasi tersebut wajib melaporkan keuangan sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tersebut. SAP berbasis Akrual ini dinyatakan di dalam bentuk PSAP yang juga ditambahkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah.

Penyusunan SAP dengan basis Akrual ini dilakukan oleh KSAP melalui proses penyusunan yang disebut *due process* atau baku penyusunan. Proses inimenjadi pertanggung jawaban dari KSAP yang tersaji secara lengkap dalam Lampiran III pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut. Penerapan ini dilakukan bertahap guna memperhatikan persiapan dan juga urutan dari ruang lingkup laporan di pemerintah pusat. SAP dari basis Kas ke arah SAP basis Akrual ini juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan juga dinyatakan di PSAP.

Pengakuan mengenai item yang ada di sektor necara dalam penerapan berbasis akrual ini tersusun secara rinci sebagai berikut:

1. Persediaan ketika potensi manfaat ekonomi di masa depan yang didapatkan oleh pemerintah, akan diakui jika memiliki nilai dan biaya yang bisa diukur dengan andal. Persediaan tersebut akan diakui jika kepindahannya diterima dengan lengkap.
2. Investasi menjadi sebuah pengeluaran aset dan kas yang diakui jika memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki manfaat ekonomi dan sosial serta mempunyai potensi masa depan yang cukup cerah dari sebuah investasi yang didapatkan oleh pemerintah.
 - b. Nilai perolehan dari investasi ini bisa diukur dengan lebih *reliable*. Investasi jangka pendek tidak masuk ke dalam laporan realisasi anggaran. Sementara investasi jangka panjang, masuk ke dalam laporan realisasi anggaran.
3. Aktiva tetap harus diakui sebagai aset tetap dan berwujud jika mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki manfaat lebih dari 1 tahun
 - b. Biaya mendapatkan aset bisa diukur
 - c. Tidak akan dijual dalam operasi entitas
 - d. Didapatkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan kembali
4. Konstruksi Dalam pengerjaan bisa diakui sebagai KD jika memiliki unsur :
 - a. Konstruksi sudah selesai dikerjakan
 - b. Bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan konstruksi tersebut
5. Kewajiban akan diakui jika mengeluarkan dari sumber daya ekononmi tersebut dilakukan guna merampungkan pengeluaran tersebut. Dan memiliki nilai penyelesaian yang bisa diukur dengan andal.

E. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SAP BASIS AKRUAL

SAP dengan basis akrual ini tentu saja mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan akuntansi dengan basis akrual ini terdiri dari:

1. Beban akan diakui ketika melakukan transaksi dengan penyajian informasi yang diberikan cukup terpercaya.

2. Pendapatan akan diakui ketika transaksi terjadi dengan informasi yang terpercaya meski belum ada kas yang masuk.
3. Penerimaan dan pembayaran akan masuk ke dalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi tersebut.
4. Peningkatan pendapatan perusahaan terjadi disebabkan kas yang belum diterima. Dan hal ini diakui ke dalam pendapatan.
5. Laporan keuangan bisa menjadi pedoman dalam menentukan langkah kebijakan.
6. Laporan keuangan bisa diperbandingkan dengan entitas lainnya.

Sementara untuk kekurangan dari akuntansi berbasis akrual ini terdiri dari:

1. Biaya yang belum dibayarkan akan dicatat sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan di dalam kas
2. Resiko pendapatan yang tidak tertagih bisa mengurangi pendapatan pada laporan keuangan.
3. Perkiraan pelunasan kas tidak bisa diprediksi.

F. URAIAN MENGENAI LAPORAN SAP BERBASIS AKRUAL

Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menggunakan SAP berbasis Akrual ini, terdapat berbagai macam laporan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Dan uraian laporan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
LRA yang merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan ini akan menampilkan perbandingan anggaran dan juga realisasinya dalam 1 periode laporan tersebut.
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dana yang tersisa guna menutup anggaran yang kurang agar bisa berjalan dengan baik.
3. Neraca

Neraca menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang mengatur ke dalam neraca tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah dari peristiwa masa lalu yang memberikan manfaat di sektor ekonomi dan juga sosial yang bisa membantu pemerintah di masa depan. Dan aset ini bisa diukur dalam satuan uang.
 - b. Kewajiban merupakan utang yang terjadi karena peristiwa masa lalu yang diselesaikan dari aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang menjadi selisih antara aset dan juga kewajiban pemerintah tersebut.
4. Laporan Operasional
- Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas dimana pemerintah pusat atau daerah akan mengelola ekuitas tersebut. Hal ini tentu saja untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di dalam 1 periode laporan. Unsur yang terkandung di dalam Laporan Operasional ini sebagai berikut:
- a. Pendapatan merupakan hak dari pemerintah yang disebut sebagai nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban merupakan kewajiban pemerintah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer merupakan hak penerimaan dan juga kewajiban pengeluaran dari entitas pelaporan dimana dana perimbangan dan bagi hasil termasuk di dalamnya.
 - d. Pos Luar biasa merupakan pendapatan dan beban luar biasa yang terjadi disebabkan operasi luar biasa yang tidak terkendali.
5. Laporan Arus Kas
- Laporan tersebut menampilkan informasi yang berhubungan dengan kas dan juga aktifitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Unsur yang terdapat di dalam laporan arus kas ini sebagai berikut:
- a. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke dalam Bendaraha Umum Negara dan Daerah

- b. Pengeluaran kas yaitu semua kas yang keluar dari Bendaharan Umum Negara dan Daerah.
- 6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan
- 7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional dan juga Laporan Perubahan Ekuitas dan juga Neraca serta Arus Kas. Catatan ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut.

G. PENERAPAN SAP AKRUAL

Dampak perubahan akuntansi berbasis kas menuju akuntansi dengan basis akrual ini berpengaruh kepada proses pencatatan dan laporan keuangan yang dihasilkan di sektor akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan sendiri adalah proses pencatatan dan juga penerapan kas yang masuk ke dalam akuntansi anggaran. Praktis transaksi tertentu dengan penerapan berbasis kas masih dilakukan.

Dampak positif dari penerapan ini adalah memberikan dukungan kepada manajemen kinerja yang bersinergi dengan manajemen keuangan sehingga pembiayaan dan juga alokasi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik. Begitu pula dengan peningkatan laporan keuangan dan fasilitas dalam manajemen aset dan kas.

Keuangan yang sudah dicatat dengan basis akrual tersebut akan memberikan kemudahan kepada pemerintah yang bisa membandingkan antara sumber daya ekonomi, kinerja, keuangan hingga arus kas yang tercatat di entitas pemerintah tersebut. Sistem ini bisa mengevaluasi kemampuan pemerintah guna mengeluarkan dana kegiatan dalam pemenuhan kewajiban dan komitmennya.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

A. PRINSIP AKUNTANSI

Prinsip akuntansi yang berlaku secara umum memiliki makna bahwasanya laporan keuangan di dalam sebuah perusahaan, bisa dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK pada Nomor 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi. Dan tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan dari para pengguna seperti investor dan juga karyawan perusahaan.

Prinsip akuntansi ini juga membantu para akuntan guna menerapkan prinsip yang konsisten pada organisasi yang berbeda. Dan prinsip tersebut bisa menjadi standar akuntansi yang bisa digunakan oleh akuntan lain di perusahaan yang berbeda. Bentuk dari prinsip akuntansi tersebut meliputi konvensi, aturan dan prosedur yang dilakukan guna merumuskan praktik akuntansi dalam perlakuan umum ketika saat-saat tertentu. Metode akuntansi harus memenuhi beberapa kondisi yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Metode akan digunakan pada kasus yang mempunyai nilai yang cukup signifikan serta kondisi yang memungkinkan guna memakai metode tersebut.
2. Metode ini mendapatkan dukungan dari kajian-kajian akuntansi profesional dan juga lembaga yang berwenang
3. Metode ini secara tertulis meraih dukungan dari para pengajar dan juga akuntan yang memiliki kredibilitas.

Prinsip Akuntansi Berlaku Umum menggunakan acuan dari berbagai macam sumber dimana salah satunya adalah Ikatan Akuntansi Indonesia yang terdiri dari:

1. Prinsip akuntansi mendapatkan pengakuan dan juga pengatur standar dari IAI
2. Pernyataan dari lembaga, badan hingga pakar dalam pelaporan keuangan yang menimbang isu-isu akuntansi dan prakteknya serta berlaku secara umum. Kondisi syarat dari proses tersebut diatur oleh IAI dan sudah dibuka untuk publik.
3. Pernyataan dari lembaga atau badan diakui oleh pengatur standar akuntansi yaitu IAI, namun belum dibuka dan dikomentari oleh publik.

4. Praktek dan pernyataan resmi yang tersebar secara luas, diakui sebagai ketentuan umum dan lazim pada industri tertentu yang penerapannya berada dalam kondisi khusus dan penerapan standar akuntansi yang berlaku secara umum.

B. STANDARD INTERNASIONAL AKUNTANSI SETOR PUBLIK

Organisasi sektor publik sekarang ini sudah mengimplementasikan sistem akuntansi ke dalam sistem pelaporan keuangan yang ada di perusahaan atau lembaga serta organisasi tersebut. Namun praktik akuntansi tersebut tentu menyajikan perbedaan terutama pada pelaporan keuangan tersebut. Hal ini disebabkan belum meratanya standar baku akuntansi yang seharusnya bisa digunakan untuk mengatur praktik akuntansi bagi sektor publik. Terutama untuk organisasi dan lembaga.

Federasi Akuntansi Internasional atau IFAC membentuk suatu tugas khusus guna menyajikan standar akuntansi publik kepada khalayak umum. Tugas khusus ini diserahkan kepada *Public Sector Committee* yang diperintahkan untuk menyusun standar akuntansi untuk organisasi di sektor publik yang sesuai dengan standar internasional. Dan standar ini disebut pula dengan *International Public Sector Accounting Standard* atau disebut sebagai IPSAS dan juga disebut Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik.

Gugus tugas ini menyusun standar akuntansi dan juga menyajikan program yang sistematis agar aplikasi IPSAS ini bisa digunakan oleh semua akuntan dan juga entitas publik di semua negara. Standar Akuntansi Internasional atau IAS menjadi acuan bagi gugus tugas tersebut dalam menyusun standar untuk akuntansi publik tersebut. Terutama pada pernyataan yang sesuai dengan karakteristik dari akuntansi publik.

Dengan menggunakan IPSAS, diharapkan bisa memberikan keuntungan di dalam kualitas laporan keuangan di sektor publik serta peningkatan yang signifikan terhadap laporan-laporan tersebut. Dan tentu saja berharap informasi yang disajikan akan menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan sisi transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah.

C. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Pelaporan keuangan akuntansi dan juga audit di sektor pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah memang menjadi salah satu hal yang harus mendapatkan perhatian. Dan guna memenuhi kebutuhan tersebut, maka Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP ini dibangun.

Komite SAP ini adalah sebuah perjalanan reformasi di sektor keuangan yang ada di Indonesia. Pembentukan kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tahun 2000 lalu, menjadi salah satu jalan dalam penyusunan standar akuntansi keuangan bagi semua unit kerja yang ada di pemerintahan. Dari proses tersebut, maka dicetuskan *Exposure Draft* yang menjadi Standar Akuntansi Sektor Publik dimana Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik dari IAI yang merilis draft tersebut. *Exposure Draft* ini memiliki 6 hal yang dikeluarkan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan
2. Laporan arus kas
3. Koreksi surplus dan defisit, kesalahan fundamental dan kebijakan akuntansi yang berubah.
4. Dampak perubahan valas
5. Kos Pinjaman
6. Laporan Keuangan entitas kendalian dan konsolidasi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP yang didukung oleh Keppres dengan Nomor 84 Tahun 2004 mengenai Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Tugas dari komite ini akan mempersiapkan mengenai konsep rancangan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah yang menunjang dari prinsip akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

KSAP sendiri terdiri dari Komite Konsultatif dan juga komite kerja. Tugas dari Komite Konsultatif ini akan memberikan konsultasi dan juga pendapat mengenai perumusan konsep dari peraturan pemerintah dalam mengatur SAP tersebut. Sementara Komite Kerja akan mempersiapkan, menyusun dan juga merumuskan peraturan pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintah tersebut. Pelaporan tugas tersebut akan dilakukan kepada Menteri Keuangan secara berkala.

Materi yang diterbitkan oleh KSAP dalam proses penyusunan SAP ini adalah:

1. International Federation of Accountant
2. International Accounting Standards Committee
3. International Monetary Fund

4. IAI
5. Financial Accounting Standards Board
6. Governmental Accounting Standards Board
7. Undang-Undang dan Perpu Republik Indonesia
8. Organisasi profesional yang membidangi keuangan dan akuntansi.

Standar Akuntansi Pemerintah ini menjadi acuan untuk lingkup akuntansi pemerintah baik pusat dan juga departemen hingga ke pemerintah daerah yang diharapkan bisa memberikan performa kualitas yang meningkat di sektor akuntansi dan pelaporan keuangan. Dan proses penyusunan SAP ini memiliki langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi topik dari SAP
2. Konsultasi kepada Komite Pengarah mengenai topik dan isi
3. Pembentukan Kelompok-kelompok kerja
4. Riset oleh Kelompok Kerja
5. Draft awal
6. Pembahasan draft awal di Komite Kerja
7. Pengembalian keputusan pada Komite Kerja
8. Pelaporan Kepada Komite Pengarah dan persetujuan Draft Publikasi
9. Draft Publikasi dirilis
10. Dengar pendapat publik dan terbatas
11. Tanggapan atas Draft Publikasi
12. Pertimbangan dari BPK atau Badan Pengawas Keuangan
13. Pembahasan dari tanggapan BPK
14. Finalisasi Standard dan pemberlakukannya
15. Sosialisasi awal.

Standar Akuntansi Pemerintah sendiri tersusun dari Kerangka Konseptual dan juga 12 pernyataan yang terdiri dari :

1. Penyajian Laporan Keuangan (PSAP 01)
2. Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02)
3. Laporan Aliran Kas (PSAP 03)
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (PSAP 04)
5. Akuntansi Persediaan (PSAP 05)
6. Akuntansi Investasi (PSAP 06)
7. Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07)
8. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan (PSAP 08)
9. Akuntansi Kewajiban (PSAP 09)
10. Koreksi dan kebijakan Akuntansi yang dirubah (PSAP 10)
11. Laporan Keuangan Konsolidasi (PSAP 11)

12. Laporan Operasional (PASP 12)

D. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini akan merumuskan konsep mengenai laporan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dan kerangka konseptual ini sebagai pedoman dan acuan untuk:

1. Penyusun SAP dalam melakukan tugas
2. Penyusun Laporan Keuangan yang belum diatur oleh Standar Akuntansi Pemerintah
3. Pemeriksaan mengenai laporan keuangan
4. Para pengguna laporan keuangan ketika menafsirkan informasi mengenai laporan tersebut.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintah ini memiliki fungsi utama sebagai bahan acuan di sektor akuntansi dan keuangan yang bisa diatasi ketika terjadi sebuah masalah di bidang akuntansi yang belum diatur di dalam SAP. Jika terjadi konflik diantara kerangka konseptuan dan juga standar akuntansi, tentu saja ketentuan standar akuntansi tersebut akan lebih diunggulkan. Dan yang yang dibahas pada kerangka konseptual SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan akuntansi pemerintah
2. Pengguna informasi akuntansi
3. Entitas pelaporan keuangan
4. Peran dari pelaporan keuangan dan dasar hukum
5. Asumsi dasar atas karakteristik kualitatif yang menampilkan manfaat informasi di dalam laporan keuangan serta prinsip akuntansi.
6. Definisi, pengakuan dan pengukuran unsur dari laporan keuangan.

Entitas dari pelaporan adalah unit pemerintahan yang memiliki 1 atau lebih entitas akuntansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, harus melaporkan pertanggung jawaban atas pelaporan keuangan dengan tujuan yang yang terdiri:

1. Pemerintah pusat
2. Pemerintah daerah
3. Kementrian negara dan lembaga pemerintah
4. Organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Di dalam penetapan entitas tersebut, tentu saja ada berbagai macam pertimbangan mengenai syarat dari pengendalian, pengelolaan, dan juga penguasaan dari entitas pelaporan kepada aset,

yuridiksi dan juga misi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dan wewenang dimana terpisah dari entitas pelaporan tersebut. Laporan keuangan di sektor pemerintah sendiri tersusun guna memenuhi informasi yang disajikan oleh kelompok pengguna pada keuangan pemerintah yang tidak terbatas kepada:

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat
3. Lembaga pengawas
4. Lembaga pemeriksa
5. Pihak yang berperan dalam donasi, investasi dan pinjaman
6. Pemerintah

Ada 8 prinsip akuntansi yang disajikan di sektor pelaporan keuangan pemerintah yang terdiri dari:

1. Basis kas digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah pada sektor pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sementara basis akrual digunakan dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca.
2. Aset akan dicatat sesuai dengan pengeluaran kas dan setara kas yang akan dibayar. Atau sesuai dengan nilai wajar dari sebuah imbalan dalam mendapatkan aset tersebut. Sementara kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan juga setara kas. Nilai historis bisa diandalkan jika penilaian lain bisa lebih obyektif dan diverifikasi yang termasuk ke dalam prinsip Nilai Historis.
3. Pendapatan dengan basis kas yang sudah tersedia ini, telah diotorisasi melalui anggaran pemerintah di dalam suatu periode transaksi guna membayar hutang dan belanja pemerintah pada periode tersebut. Prinsip ini disebut pula dengan realisasi.
4. Informasi akan disajikan secara wajar mengenai transaksi serta peristiwa lain yang perlu dicatat sesuai dengan substansi dan juga realitas ekonomi yang tidak hanya disajikan berdasarkan aspek formalitas semata. Prinsip ini disebut sebagai prinsip substansi yang mengungguli bentuk formal.
5. Pelaporan keuangan entitas dan kegiatan akuntansi dibagi menjadi beberapa periode pelaporan agar kinerja entitas bisa dikur dengan posisi sumber daya ekonomi yang bisa ditentukan. Ini yang disebut sebagai prinsip periodisitas.

6. Perlakuan akuntansi yang dilakukan pada kejadian yang sama dari satu masa ke masa oleh entitas pelaporan adalah prinsip konsistensi di dalam prinsip akuntansi.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap akan menyajikan laporan mengenai keuangan secara komplit dengan informasi yang diperlukan bagi user atau pengguna. Informasi tersebut bisa disajikan pada lembar muka laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip Penyajian Wajar memiliki faktor pertimbangan sehat yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan kala menghadapi situasi tidak pasti dan juga keadaan yang tertentu. Hal ini akan mengungkapkan hakikat bahwa pertimbangan sehat akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut.

E. STRATEGI PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI PADA NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang menghadapi permasalahan di dunia akuntansi yang lebih kompleks dan juga rumit. Bukan hanya pada proses penetapan sumber yang efektif saja, namun permasalahan di bidang ekonomi, sosial, politik dan juga institusional menjadi permasalahan yang menimpa negara tersebut. Dalam penetapan mengenai standar akuntansi pada negara berkembang, ada 4 pendekatan secara garis besar yang digunakan dalam proses tersebut. Yang terdiri dari:

1. Evolusioner
Pendekatan ini dilakukan sebagai perbuatan standar dalam menentukan pengembangan standar akuntansi tanpa adanya pengaruh dari manapun termasuk dari luar negara. Rintangan yang kemungkinan akan muncul adalah partner asing yang harus beradaptasi dengan standar khusus yang diterbitkan oleh negara tersebut.
2. Transfer Teknologi
Pengembangan melalui transfer teknologi akuntansi bisa dilakukan melalui kegiatan akuntan internasional dan juga perusahaan multinasional. Para praktisi yang berpraktik di negara-negara berkembang tersebut bisa melakukan perjanjian internasional dan juga kerja sama dengan nota kesepakatan dalam pertukaran teknologi dan informasi.
3. Standar Akuntansi Internasional

Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan oleh negara berkembang adalah dengan menggunakan dan menetapkan standar akuntansi internasional. Caranya dengan bergabung bersama International Accounting Standar Board atau IASB guna menerapkan ketentuan mereka di dalam standar akuntansi negara. Motif dari strategi ini yaitu:

- a. Biaya persiapan jauh lebih ringan dan pembuatan sesuai dengan standar internasional.
 - b. Bisa ikut dalam harmonisasi internasional
 - c. Mendapatkan fasilitas pertumbuhan investasi yang masuk ke kas negara
 - d. Praktisi bisa meniru standar profesional internasional.
 - e. Melegitimasi status sebagai anggota internasional.
4. Strategi situasional
- Pendekatan ini dilakukan untuk mengembangkan standar akuntansi yang berdasarkan analisa prinsip dan praktik akuntansi di negara maju dan juga latar belakang lingkungan yang mendasarinya. Strategi ini akan meminta pertimbangan terhadap faktor diagnostik guna menentukan standar akuntansi yang berkembang di negara-negara tersebut.

F. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH

Kerangka konseptual SAP ini akan mempertimbangkan mengenai ciri penting dari lingkungan pemerintahan yang bisa menetapkan tujuan akuntansi dan juga pelaporan keuangan. Dan ciri penting ini akan meliputi:

1. Ciri Utama Struktur Pemerintah
 - a. Bentuk Umum pemerintahan dan juga pemisahan kekuasaan di sektor pemerintah.

Negera Indonesia memiliki asas demokrasi dimana kekuasaan ada di tangan rakyat. Oleh sebab itu delegasi dari rakyat ini akan dikuasakan kepada pejabat publik dengan jalan pemilihan umum. Dengan adanya delegasi kekuasaan kepada pemerintah dan juga pejabat publik, maka terjadi pemisahan wewenang di sektor eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Hal ini juga berlaku di sektor keuangan pemerintah.

Pihak eksekutif akan menyusun anggaran dan menyerahkannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan *approval* atau persetujuan guna di laksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan, lembaga eksekutif akan melaksanakan dan bertanggung jawab atas keuangan tersebut.

b. Otonomi pemerintahan.

Sistem pemerintahan otonomi dan transfer ini memiliki 3 lingkup yang terdiri dari pemerintah pusat, propinsi dan juga tingkat daerah. Pemerintah yang memiliki cakupan luas yang lebih besar akan menyajikan arahan kepada pemerintahan di bawahnya. Sistem bagi hasil dan alokasi dana umum serta hibah dilakukan pemerintahan yang penghasilannya lebih besar.

c. Pengaruh dari proses politik.

Tujuan pemerintah yang paling utama adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dari semua rakyat. Dan tentu saja pemerintah akan melakukan upaya guna menyeimbangkan fiskal agar bisa menyeimbangkan keuangan negara yang berasal dari pajak dan juga sumber lain agar masyarakat bisa sejahtera. Dan proses politik menjadi perwujudan keseimbangan tersebut agar selaras dengan berbagai macam kepentingan di masyarakat.

d. Pajak dan Pelayanan

Sebagian besar dari pendapatan pemerintah memang dihasilkan dari pajak. Dan tentu saja pungutan pajak ini guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan jumlah pajak yang dipungut tentu saja harus berhubungan secara langsung dengan pelayanan yang berkaitan erat dengan wajib pajak. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ini tentu saja memiliki kandungan sifat tertentu yang harus dipertimbangkan guna mengembangkan laporan keuangan yang berarti:

- Pembayaran pajak adalah wajib dan bukan suka rela.
- Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti halnya

pajak penghasilan, kekayaan, aktifitas ekonomi yang memiliki nilai tambah, dan nilai kenikmatan.

- Efisiensi pelayanan akan disandingkan dengan pungutan meski memiliki takaran yang cukup sulit untuk diukur.
- Pengukuran mengenai kualitas dan juga kuantitas dari pelayanan yang disajikan pemerintah tentu relatif lebih sulit.

2. Ciri keuangan pemerintah yang memiliki peran penting untuk pengendalian.

a. Anggaran Sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal dan juga alat pengendali anggaran pemerintah menjadi dokumen formal dari kesepakatan antara lembaga eksekutif dan juga legislatif mengenai belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah tersebut. Anggaran yang mengkoordinasi aktifitas belanja pemerintah akan menjadi landasan dalam upaya perolehan pendapatan dan juga pembiayaan untuk pemerintah dalam periode tertentu. Fungsi anggaran tersebut tentu saja memiliki pengaruh yang sangat penting di ilmu akuntansi dan laporan keuangan yang disebabkan:

- Anggaran adalah pernyataan kebijakan fiskal pemerintah
- Anggaran adalah target fiskal yang bisa menyajikan keseimbangan diantara pendapatan, belanja hingga pembiayaan
- Anggaran menjadi acuan dalam pengendalian dari konsekuensi hukum.
- Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja dari pemerintah
- Hasil pelaksanaan anggaran ini dituangkan ke dalam laporan keuangan pemerintah yang menjadi pernyataan tanggung jawab pemerintah kepada publik.

b. Investasi dalam aset tidak langsung yang bisa menghasilkan pendapatan merupakan langkah pemerintah guna melakukan investasi yang cukup besar dalam bentuk aset demi mendapatkan pendapatan untuk pemerintah. Hal ini seperti gedung perkantoran, jalan, jembatan, kawasan reservasi hingga

taman-taman kota. Aset itu tentu saja harus mempunyai manfaat hingga program pemeliharaan dan juga rehabilitasi bisa dilakukan dengan mempertahankan fungsi dari aset-aset tersebut yang menguntungkan untuk pemerintah.

- c. Pemakaian Akuntansi dana dengan tujuan pengendalian.

Akuntansi Dana merupakan sistem akuntansi yang diterapkan di dalam lingkungan teritori pemerintah yang memisahkan dana berdasarkan tujuan. Sehingga entitas akuntansi mampu menampilkan keseimbangan diantara belanja dan juga pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah tersebut. Akuntansi dana ini digunakan sebagai tuuan dalam pengendalian masing-masing kelompok.

Peran dan juga tujuan dari laporan keuangan ini tentu saja untuk menyajikan informasi di bidang akuntansi yang relevan tentang posisi keuangan dan juga semua transaksi yang dilakukan oleh sebuah entitas dalam 1 periode laporan. Laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai langkah dalam mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan dan juga evaluasi efektifitas.

Setiap entitas pelaporan ini memiliki kewajiban guna melaporkan setiap upaya dan usaha yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis pada periode tersebut demi kepentingan-kepentingan yang terdiri dari:

1. Akuntabilitasn akan mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan juga pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada entitas pelaporan tersebut agar tujuan yang hendak diinginkan bisa tercapai dengan baik.
2. Manajemen akan membantu para pengguna dalam melakukan proses evaluasi pada pelaksanaan kegiatan dari entitas pelaporan di satu periode agar fungsi dari perencanaan dan pengelolaan lebih mudah. Begitu pula dnegan pengendalian dari aset, kewajiban dan juga ekuitas pemerintah.
3. Transparansi akan menyajikan informasi mengenai sisi akuntansi dan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini tentu saja berdasar pertimbangan

bahwasanya masyarakat memiliki hak guna mengetahui laporan tersebut.

4. Kesimbangan antara generasi yang bisa membantu dalam menyajikan pelaporan keuangan dalam pembiayaan semua pengeluaran yang dialokasikan pada 1 periode waktu. Dan generasi yang akan datang diasumsikan akan menanggung beban dari pengeluaran dana tersebut.

Tujuan dari laporan keuangan tersebut akan membuat pemerintah harus menyajikan informasi mengenai laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna. Hal ini untuk menilai akuntabilitas dari sebuah keputusan di sektor ekonomi, sosial dan juga politik dengan cara:

1. Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi dan juga pemakaian dana keuangan tersebut.
2. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode demi pembiayaan semua pengeluaran
3. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan dan juga hasil yang dicapai
4. Menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan yang menjadi sumber dana kegiatan dan juga pencukupan kebutuhan kas tersebut.
5. Menyajikan informasi tentang posisi keuangan dan juga kondisi entitas yang memiliki kaitan erat dengan sumber penerimaan yang terdiri dari jangka pendek dan juga jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan juga pinjaman pemerintah
6. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan yang mengalami kenaikan atau penurunan karena kegiatan yang terjadi di dalam 1 periode tersebut. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan juga penggunaannya yang terdiri dari transfer dan transaksi, pembiayaan, sisa lebih dan kurang, pelaksanaan anggaran, saldo anggaran dan juga Laporan Operasional dari entitas pelaporan tersebut.

BAB 4

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

B. TUJUAN PELAPORAN BERDASARKAN SFAC

Financial Accounting Standard Board atau FASB mengeluarkan sebuah statement yang bernama *Statement of Financial Accounting Concepts* yang berisi tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba yang terdiri dari:

1. Laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dan juga pengguna lainnya di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi tersebut.
2. Menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga pengguna lainnya dalam melakukan penilaian dalam pelayanan yang disajikan oleh organisasi tersebut.
3. Menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.
4. Menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan juga kekayaan bersih dari organisasi nirlaba yang menyajikan pula pengaruh dari peristiwa ekonomi dan juga transaksi yang bisa mengubah sumber daya tersebut.
5. Menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba tersebut selama 1 periode. Pengukuran secara periodeik mengenai perubahan jumlah dan juga keadaan dari sumber kekayaan nirlaba dan juga informasi mengenai usaha dan pelayanan organisasi sebagai penilaian kinerja.
6. Menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta utang serta pembayarannya yang berpengaruh kepada likuiditas organisasi.
7. Menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi mengenai keuangan organisasi nirlaba tersebut.

C. PERLUNYA INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Kebutuhan mengenai informasi mengenai pemakai laporan keuangan pemerintah, tentu sangat penting. Dan kebutuhan informasi tersebut tersaji sebagai berikut:

1. Masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga dan juga kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah.
2. Masyarakat sebagai pembayar pajak dan juga pemberi bantuan, tentu ingin mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana dari pajak tersebut yang sudah disetorkan. Publik juga berhak mengetahui mengenai kebijakan fiskal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga pengeluaran lainnya.
3. Investor dan juga kreditor berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat resiko, likuiditas dan juga solvabilitas.
4. Kelompok elit politif membutuhkan informasi mengenai keuangan guna melakukan pengawasan dan juga pencegahan dini jika terjadi laporan keuangan negara yang terdapat penyelewengan.
5. Manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informasi manajemen guna membantu pengendalian organisasi, pengukuran kinerja.
6. Pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya.

Komponen laporan keuangan yang masuk ke dalam draft Standar Akuntansi Pemerintah dengan Basis Akrual ini memiliki 7 komponen laporan yang ada di dalam draft tersebut dengan 3 jenis laporan tambahan.

D. TEORI LAPORAN KEUANGAN DI SEKTOR PUBLIK

Ada 2 jenis pelaporan yang terdiri dari pelaporan keuangan dan juga pelaporan kinerja di dalam pelaporan organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja ini adalah refleksi dari kewajiban yang menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan dan juga sumber daya yang harus dipertanggung jawabkan.

Pelaporan ini menjadi salah satu wujud dari proses akuntabilitas. Entitas yang memiliki kewajiban guna menyajikan laporan kinerja organisasi sektor publik tersebut adalah pemerintah

di tingkat pusat dan daerah, unit kerja pemerintah dan juga unit pelaksana. Lalu LSM dan juga partai politik hingga yayasan dan organisasi lainnya.

Laporan akan diserahkan kepada masyarakat dan juga DPR agar mereka bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kinerja program organisasi dan juga unit. Pelaporan keuangan sendiri menjadi cerminan dari kondisi keuangan dan juga transaksi yang sudah dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan pada sektor publik ini menjadi representasi dari kondisi keuangan dan juga transaksi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Tujuan dari pelaporan keuangan tersebut adalah menyajikan informasi mengenai posisi kinerja, keuangan dan juga arus entitas yang bisa memberikan keuntungan bagi para pengguna. Dan tentu saja dilakukan untuk menilai kinerja dari keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan dari pelaporan keuangan di sektor publik ini guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang bisa dipercaya dengan beberapa cara berikut:

1. Menyajikan informasi tentang sumber daya, alokasi dan juga pemakaian sumber daya keuangan tersebut.
2. Menyajikan informasi mengenai sisi entitas dalam pendanaan aktifitas dalam pemenuhan kebutuhan kas.
3. Menyajikan informasi guna melakukan evaluasi entitas dan juga pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban tersebut.
4. Menyajikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah entitas dan juga perubahan yang terjadi.
5. Menyajikan informasi menyeluruh dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berhubungan dengan biaya jasa, efisiensi dan juga pencapaian tujuan.

E. TIPE LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang akan saling terintegrasi. Dan laporan tersebut meliputi beberapa hal berikut ini:

1. Neraca atau Laporan Posisi Keuangan
Laporan ini merupakan laporan yang menampilkan posisi aktiva, hutang dan juga modal dari pemilik dalam 1 periode

tersebut. Laporan ini harus memiliki pos-pos yang menampilkan jumlah seperti:

- a. Properti
 - b. Aktiva tidak berwujud
 - c. Aktiva keuangan
 - d. Investasi
 - e. Persediaan
 - f. Pemulihan transaksi termasuk pajak dan transfer
 - g. Piutang
2. Laporan Surplus dan Defisit
- Laporan ini akan menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang terjadi selama 1 periode. Laporan keuangan ini harus mencakup beberapa pos lini sebagai berikut:
- a. Pendapatan dari aktiva operasional
 - b. Surplus atau defisit dari aktiva operasional
 - c. Biaya keuangan
 - d. Surplus atau defisit neto saham dengan metode ekuitas dalam pelaksanaannya
 - e. Surplus atau defisit pada aktifitas biasa
 - f. Pos luar biasa
3. Laporan Perubahan Aktiva
- Laporan ini akan menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran tertentu dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Pendapatan dan juga biaya lain harus diakui sebagai perubahan aktiva pada setiap kontribusi dan juga distribusi. Laporan ini meliputi:
- a. Kontribusi langsung oleh pemilik dan juga distribusi kepada pemilik tersebut.
 - b. Saldo akumulasi surplus dan defisit pada tanggal pelaporan, pergerakan dalam 1 periode dan juga pada awal periode.
 - c. Penjabaran mengenai komponen aset dan ekuitas neto yang dilakukan secara terpisah dan juga rekonsiliasi yang tercatat pada setiap komponen tersebut.
4. Laporan Arus Kas
- Laporan ini menampilkan informasi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kas pada periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran tersebut diklarifikasi berdasarkan kegiatan operasi dan juga pembiayaan serta kegiatan investasi.

5. Catatan Laporan Keuangan dan Kebijakan akuntansi
- Catatan laporan keuangan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan yang menampilkan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pengungkapan yang menunjang. Menurut PP No. 8 tahun 2006 dan juga Permendagri No. 13 Tahun 2006, catata atas laporan keuangan entitas publik harus memiliki hal sebagai berikut:
- a. Kebijakan keuangan atau fiskal dan juga ekonomi makro di dalam catatan atas laporan keuangan meliputi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja, pendapatan hingga penentuan sumber daya. Kondisi ekonomi makro juga harus diungkapkan dalam catatan tersebut.
 - b. Iktisak pembahasan kinerja keuangan harus mampu menguraikan strategi dan sumber daya, memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi dan rencana keuangan sert menguraikan prosedur yang disusun oleh manajemend alam upaya menyajikan informasi kinerja yang relevan.
 - c. Kebijakan akuntansi ini akan memuat entitas pelaporan dan juga akuntansi yang menjadi dasar dalam pelaporan keuangan. Basis pengukuran pada kebijakan akuntansi tersebut juga digunakan pada saat penyusunan pelaporan keuangan tersebut. Kebijakan akuntansi diperlukan guna memahami laporan keuangan.
 - d. Penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca dan juga arus kas yang terdiri dari laporan realisasi anggaran yang terdapat unsur pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan. Sementara neraca pengungkapan terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek dan panjang serta ekuitas dana lancar dan investasi. Lalu laporan arus kas ini terdiri dari aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, aset pembiayaan dan juga aktifitas non anggaran.
 - e. Pengungkapan lain memiliki hal-hal yang bisa memberikan pengaruh kepada laporan keuangan yang terdiri dari pergantian manajemen pemerintahan, kesalahan manajemen terdahulu, kontijensi, komitmen,

pemekaran entitas tahun berjalan, kejadian dampak sosial dan juga kejadian penting usai tanggal neraca tersebut.

F. SISTEM LAPORAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau disebut pula SAPP ini merupakan prosedur yang terdiri pengumpulan data, pencatatan dan juga ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan juga operasi dari pemerintah pusat tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP ini akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses tanggung jawab pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasi laporan realisasi anggaran dari semua Kementerian Negara dan juga Lembaga yang direkonsiliasi.
- b. Neraca Pemerintah
Neraca pemerintah pusat menjadi konsolidasi dari neraca SAI dan juga SAKUN.
- c. Laporan Arus kas
Laporan ini menjadi langkah konsolidasi Laporan Arus Kas dari semua Kanwil DJPBN.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
Menjadi perincian dan juga penjelasa mengenai analisa dari nilai yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran dan juga Neraca Pemerintah serta Laporan Arus Kas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP sendiri terdiri dari beberapa sistem akuntansi sebagai berikut:

1. Sistem Akuntansi Bendahara Umum.
Sistem Akuntansi Bendahara Umum akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan juga Pengguna Anggaran bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang terdiri dari sub sistem sebagai berikut:
 - a. Sistem Akuntansi Pusat atau SiAP ini meliputi Sistem Akuntansi Kas Umum Negara atau SAKUN dan juga Sistem Akuntansi Umum yaitu SAU.
 - b. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H)
 - c. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah atau SA-IP

- d. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman atau SA-PP
- e. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah atau SA-TD
- f. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau SABAPP.
- g. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
- h. Sistem Akuntansi Badan lain atau SA-BL.

Guna menyampaikan penyusunan Laporan Keuangan BUN, pengolahan data akan dilakukan oleh Kementerian keuangan yang bertindak selaku BUN yang terdiri dari:

- a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah atau UAKBUN-D KPPN
- b. Kantor Wilayah DJPBN yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Koordinator Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah atau UAKKBUN-KANWIL
- c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat atau UAKBUN-P.
- d. Direktorat Auntansi dan Pelaporan Keuangan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN dan juga Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara atau UABUN.
- e. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN
- f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN.
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN.
- h. Direktorat Jenderal Anggaran yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN.
- i. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara atau UAPBUN
- j. Badan lainnya yang bertindak Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara.

2. Sistem Akuntansi Instansi atau SAI

Sistem Akuntansi Instansi akan dilakukan oleh Kementerian Negara dan juga lembaga yang memproses data guna menyajikan Laporan Keuangan. Dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi ini akan membentuk unit keuangan dan barang yang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran atau UAPA
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1 atau UAPPA – E1.
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah atau UAPPA – W
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atau UAKPA.

Sementara untuk Unit Akuntansi Barang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang atau UAPB
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang pada Eselon 1 atau UAPBB – E1
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah atau UAPBB – W
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang atau UAKPB.

G. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Pelaporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap yang terdiri dari beberapa tahap seperti berikut:

1. Tahap Penggolongan dan Pencacatan
Tahap ini merupakan proses identifikasi dan juga pengukuran yang menjadi bukti transaksi dan juga pencatatan di dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Jurnal ini memiliki manfaat guna menggambarkan proses yang mendapatkan pengaruh dari transaksi. Jurnal bisa dibagi menjadi beberapa jurnal khusus yang memberikan kemudahan dalam pengerjaan.
2. Tahap Ikhtisar
Transaksi yang sudah dicatat dan juga digolongkan ke dalam jurnal, akan diringkas dan juga dibukukan ke dalam buku besar rekening pada jangka waktu tertentu. Buku ini terbagi ke dalam buku besar umum dan pembantu. Fungsi dari buku tersebut adalah dengan mengumpulkan data-data transaksi yang akan diklasifikasi agar bisa divalidasi, pencatatan guna mempersiapkan laporan keuangan.

3. Tahap pelaporan

Data yang masuk ke dalam buku besar rekening tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja. Sistem pencatatan ini dibagi menjadi *single book entry* dan juga *double book keeping entry*.

Untuk *single book entry* ini merupakan sistem pencatatan keuangan yang menggunakan 1 buku besar dalam proses catatan keuangan dari transaksi.

Sementara *double book keeping entry* ini merupakan pencatatan transaksi lebih dari 1 akun buku besar. Dan pemilihan penggunaan tersebut akan tergantung kepada karakteristik dari entitas tersebut. Jika tidak terlalu kompleks, maka pilihan *single book entry* bisa menjadi pilihan yang tepat.

BAB 5

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

A. PENGERTIAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual dan juga terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar dan juga laporan keuangan dan juga operasi keuangan pemerintah pusat.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ini diterapkan bagi semua unit organisasi di pemerintah tingkat pusat yang pelaporan dan juga pencatatan keuangannya dikelola oleh pemerintah pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah :

1. MPR (Lembaga Tinggi Negara)
2. DPR
3. DPA
4. MA
5. Department dan Lembaga Non Department.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat tidak berlaku pada sistem pencatatan keuangan pada pemerintah tingkat daerah, BUMD dan juga bank pemerintah serta lembaga keuangan milik pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga Aset
SAPP difungsikan untuk menjaga aset pemerintah agar terjaga dengan baik melalui proses pencatatan, pengolahan data dan juga pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi
2. Menyajikan informasi relevan
Penyajian informasi yang akurat dan juga tepat waktu mengenai laporan tentang anggaran pemerintah pusat, menjadi tujuan dari SAPP tersebut. Hal ini bisa disajikan secara instansi dan juga nasional yang menjadi dasar dari penilaian kinerja dari pemerintah. Selain itu untuk menentukan ketaatan kepada otorisasi anggaran dan juga akuntabilitas.
3. Menyajikan informasi yang reliabiliti

Sajian informasi yang bisa dipercaya mengenai posisi keuangan dari instansi pemerintah pusat, menjadi tujuan SAPP.

4. Menyajikan informasi keuangan yang efisien
SAPP memiliki tujuan untuk menyediakan informasi mengenai keuangan negara dan juga perencanaan serta pengendalian yang efisien kepada publik.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP tersebut antara lain:

1. Berbasis Akuntansi
SAPP memakai sistem dengan basis kas guna membuat Laporan Realisasi Anggaran atau LRA dan juga basis akrual untuk membuat neraca. Keduanya merupakan disiplin ilmu akuntansi.
2. Pembukuan Berpasangan.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau *double entry system* yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi.
3. Terpadu dan Terkomputerisasi
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat memiliki beberapa subsistem yang memiliki hubungan dan juga menjadi 1 kesatuan yang tidak terpisahkan. Proses pelaporan dan pembukuan tersebut dilakukan secara komputerisasi.
4. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi
Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, kegiatan pelaporan dan pencatatan akan dilakukan dengan cara berjenjang pada unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah.
5. Bagan Perkiraan Standar
SAPP memakai perkiraan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku untuk penganggaran dan juga akuntansi.

B. LATAR BELAKANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Pembaruan di disiplin ilmu akuntansi di era modern ini terutama pada sektor pemerintah di tingkat pusat, sebenarnya sudah mulai dilakukan pada tahun 1982. Perubahan ini dilakukan guna meningkatkan akuntabilitas dari keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Akuntansi Negara atau BAKUN. Lembaga akuntansi ini

merupakan eselon 1 dari Department Keuangan yang dibantu melalui Proyek Penyempurnaan Sistem Akuntansi dan juga Pengembangan Akuntansi atau PPSAPA yang dibantu oleh pembiayaan Bank Dunia. Proyek ini memiliki latar belakang dari kondisi akuntansi dan pencatatan yang kala itu menggunakan sistem *single entry* yang terdapat beberapa kelemahan dalam proses sistem tersebut. Kelemahan itu adalah:

1. Proses penyusunan yang sangat lambat dikarenakan disusun dari beberapa sub sistem yang terpisah.
2. Sistem *single entry* ini tidak memadai dengan kompleksnya transaksi keuangan pemerintah di tingkat pusat
3. Rekonsiliasi sulit untuk dilakukan
4. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah tidak dijadikan standar sehingga sulit untuk dilaporkan
5. Tidak bisa menghasilkan neraca pemerintah.

Praktis membuat pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.01/1991 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah, bahwa di pemerintah pusat ini akan diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap. Untuk tahap pertama ini akan dilaksanakan pada tahun anggaran 1993 dan 1994. Kemudian tahap berikutnya dilakukan tahun 1999 dan 2000. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat sudah mencakup semua laporan keuangan di Department dan juga Lembaga pemerintah pusat hingga propinsi.

Target jangka waktu untuk penerapan sistem ini pada awalnya dilakukan selama 4 tahun. Akan tetapi hingga tahun 2001, belum sepenuhnya departmen dan non department pemerintah yang menerapkan SAPP secara keseluruhan. Penerapan yang cenderung lambat ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dan juga sumber daya manusia serta resistensi dari pengguna sistem yang kurang terkoordinasi.

Hal ini membuat perubahan dan juga penyempurnaan yang terus dilakukan pemerintah guna mengembangkan sistem akuntansi yang reliabel. Dan tahun 2005, pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf o pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang berisi tentang Perbendaharaan Negara.

C. KLASIFIKASI SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat ini terbagi kedalam 2 sub sistem yang terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Pusat atau SiAP.

Sistem Akuntansi Pusat atau SiAp ini akan dilaksanakan Direktorat Informasi dan juga Akuntansi atau DIA yang bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat. Dan laporan ini menjadi pertanggung jawaban pelaksanaan APBN. SiAP sendiri akan terbagi menjadi 2 sub sistem yang terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum atau SAKUM dan juga Sistem Akuntansi UMU atau SAU.

Ketika melaksanakan pelaporan dan juga pencatatan keuangan, SiAP ini akan dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang terdiri dari:

- a. KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Lembaga ini akan memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran yang ada di lembaga-lembaga negara tersebut.
- b. KPPN Khusus
Tugasnya adalah memproses data-data mengenai transaksi pengeluaran yang asalnya dari Bantuan Luar Negeri atau BLN
- c. DPKN atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Tugas dari DPKN ini adalah memproses data transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang dilakukan oleh Kantor Pusat.
- d. DIA atau Direktorat Informasi dan Akuntansi.
DIA akan melaporkan proses data pada APBN dan juga verifikasi data akuntansi mengenai transaksi penerimaan dan juga pengeluaran BUN yang akan melalui kantor pusat.
Proses pembuatan laporan yang menggunakan Sistem Akuntansi Pusat ini adalah:
 - a. KPPN
Lembaga ini akan menyusun Laporan Arus Kas dan juga Neraca KUN serta LRA yang berada di teritori kerja mereka. Laporan ini akan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dilakukan setiap bulan. Sementara KPPN Khusus akan memproses data mengenai transaksi yang didapat dari Bantuan Luar Negeri dimana laporan ini akan berisi data transaksi ke DIA dalam pekerjaan setiap bulannya.

- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kantor ini akan menyusun laporan yang berupa Laporan Arus Kas, LRA SAU dan juga Neraca KUN yang masuk ke dalam wilayah kepemimpinannya. Dan akan menghasilkan laporan keuangan di semua KPPN yang nantinya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Arus Kas, LRA dan juga Neraca KUN yang berasal dari penggabungan beberapa laporan di semua unit Dirjen Perbendaharaan yang berada di tingkat pusat dan juga di daerah.
2. Sistem Akuntansi Instansi atau SAI
Sistem ini merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna pertanggung jawaban dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki 2 sub sistem yang terdiri dari:
- a. Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK.
 - b. Sistem Akuntansi Barang milik Negara atau SABNM.

D. DASAR HUKUM PELAKSANAAN SAPP

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam proses pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 8 yang menyatakan bahwasanya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan dan fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan Anggaran Pemerintah atau APBN.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 9 menyebutkan bahwa Menteri dan juga Pimpinan Lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan juga barang Kementrian Negara atau Lembaga yang masuk ke dalam teritori mereka. Tugas utama antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengenai Kementrian Negara dan juga Lembaga.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pada Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden akan menyampaikan rancangan undang-undang mengenai pertanggung

jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang berupa laporan keuangan dimana meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca dan juga Laporan Ars Kas. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) menyebutkan Menteri Keuangan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara yang memiliki kewenangan guna menerbitkan sistem akuntansi dan pelaporan mengenai keuangan negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan bertindak sebagai Bendahara Umum Negara dan juga Daerah dalam pelaksanaan akuntansi mengenai transaksi keuangan, aset, utang dan juga ekuitas dana yang termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, akan bertindak sebagai Pengguna Anggaran yang melaksanakan sistem akuntansi terhadap transaksi keuangan, aset dan juga utang serta ekuitas dana yang termasuk ke dalam pertanggung jawabannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, mengenai Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa Menteri Keuangan akan bertindak selaku pengelola fiskal yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat guna dilaporkan kepada Presiden sebagai pemenuhan tanggung jawab pelaksanaan Anggaran Negara atau APBN.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat (2) menyebutkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri dan Pimpinan Lembaga akan menyampaikan laporan tersebut yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan juga Catatan atas laporan Keuangan yang berisi Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara dan Lembaga masing-masing.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa usai Tahun Anggaran 2005 berakhir, Pemerintah akan menyusun pertanggung jawaban pelaksanaan APBN yang berupa Laporan Keuangan.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri dan Pimpinan Lembaga wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban mengenai penggunaan dana yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan juga neraca Kementerian Negara kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

E. SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 yang mengatur Barang Milik Negara merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN dan berasal dari perolehan yang sah dari faktor lain. Perolehan yang sah tersebut bisa saja berasal dari hibah dan juga rampasan atau sitaan. Yang tidak termasuk ke dalam Barang Milik Negara yaitu barang yang dimiliki oleh Pemda yang bersumber dari APBN dan juga BUMN dan BUMD serta Bank Pemerintah.

SABNM atau Sistem Akuntansi Barang Milik Negara ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan juga neraca barang milik daerah. Guna mendukung sistem tersebut, Kementerian akan membentuk sub unit yang terdiri dari:

- a. Unit Akuntansi Pengguna Barang
UAPB ini terletak di level Kementerian atau Lembaga yang pertanggung jawabannya ada di level Menteri atau pemimpin Lembaga tersebut.
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon 1
UAPPB – E1 ini berada di level Eselon 1. Pertanggung jawaban dari unit akuntansi ini dipegang oleh Pejabat Eselon 1
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah.
Sub unit yang disebut UAPPB – W ini terletak di tingkat wilayah. Pertanggung jawaban ini diemban oleh Kepala kantor wilayah dan juga kepala unit kerja yang sudah ditentukan oleh UAPPB – W.
- d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAKPB ada di tingkat Kuasa Pengguna Anggaran yang pertanggung jawabannya ada di tangan kantor atau satuan kerja.

F. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Pemerintah pusat menerbitkan laporan keuangan yang menjadi salah satu konsolidasi dari laporan keuangan yang ada di 2 sub sistem. Yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi yang dihasilkan oleh SAI dan juga SiAP. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat akan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi pelaporan pertanggung jawaban pemerintah dalam hal pelaksanaan APBN. Laporan keuangan pemerintah ini akan diaudit sebelum diserahkan dan juga dilaporkan kepada DPR. Proses audit tersebut dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan. Setelah dinilai memenuhi syarat, maka akan dilaporkan kepada DPR. Laporan keuangan pemerintah ini terdiri dari beberapa aspek seperti:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran ini merupakan konsolidasi laporan dari semua Kementrian dan Lembaga yang sudah direkonsiliasi terlebih dahulu. Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai pendapatan, transfer, belanja dan juga surplus serta defisit hingga pembiayaan. Sisa lebih dan kurang pembiayaan anggaran tersebut nantinya akan dibandingkan dengan anggaran yang masih berada di dalam 1 periode.
- b. Neraca Pemerintah
Neraca Pemerintah Pusat ini adalah konsolidasi Neraca SAI dan juga SAKUN yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat yang berhubungan erat dengan aset, utang dan juga ekuitas dana yang tercatat pada periode anggaran tertentu
- c. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat ini adalah proses konsolidasi dari semua Kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk dan keluar selama periode tersebut. Dan laporan ini akan diklasifikasikan menurut aktifitas operasi, investasi aset non keuangan serta pembiayaan dan juga non anggaran.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan ini adalah perincian mengenai analisa dari nilai pos yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran dan juga Neraca Pemerintah serta Laporan Arus Kas. Hal ini untuk mengungkapkan laporan yang memadai.

BAB 6

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENGALAMI PERBARUAN

Reformasi dan perbaruan bukan hanya terjadi di sistem akuntansi pada pemerintah pusat saja. Sistem akuntansi pada pemerintah di tingkat daerah juga mengalami reformasi. Sistem lawas yang digunakan oleh pemerintah daerah yang bernama Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA yang sudah digunakan sejak tahun 1981 ini sudah usang dan dirubah.

Kebutuhan laporan keuangan Pemda dalam bentuk neraca dan juga laporan arus kas di tingkat daerah tentu saja harus disesuaikan dengan keluarnya PP 105 tahun 2000 pasal 38. Guna mendapatkan hasil laporan keuangan ini, maka sistem akuntansi keuangan di tingkat daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Penerapan disiplin ilmu akuntansi tersebut tentu saja bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang digunakan di sebuah negara. Ciri yang cukup penting dan juga menjadi syarat dari sistem akuntansi pemerintah sesuai dengan UN atau PBB disebutkan bahwasanya:

- a. Sistem akuntansi pemerintah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan juga konstitusi yang berlaku di sebuah negara.
- b. Sistem akuntansi pemerintah harus menyajikan informasi yang akuntabel dan juga bisa dipertanggung jawabkan serta diaudit dengan baik.
- c. Sistem akuntansi ini harus bisa menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan guna penyusunan rencana dan juga evaluasi pelaksanaan fisik dan juga keuangan.

Neraca dan juga laporan keuangan yang berupa laporan arus kas ini menjadi salah satu bentuk laporan yang disajikan oleh pemerintah daerah dan juga disusun yang sesuai dengan standar akuntansi. Dan selama ini memang pemerintah daerah belum menyajikan sistem standar akuntansi yang sesuai. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi keuangan pemerintah tersebut berdasarkan ICW Staatblads 1928 atau UU Perbendaharaan Indonesia yang tidak ditujukan guna menampilkan mengenai laporan neraca dan juga arus kas. Sehingga informasi mengenai kekayaan negara dan juga daerah tidak bisa disajikan secara komplit.

Tidak adanya standar sistem akuntansi pada daerah, membuat laporan keuangan daerah tidak bisa disusun menjadi lebih baik. Ketentuan yang sudah ada hanya mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggung jawabannya kepada DPRD. Dan pelaporan ini berbentuk neraca dan juga laporan arus kas. Semenjak tahun 2002, pemerintah daerah membuat neraca awal daerah yang berpatokan pada Pedoman SAKD yang merupakan hasil dari Tim Pokja SK Menkeu 355/2001 dan juga Keputusan Kementerian Dalam Negeri 29/2002 serta ketentuan praktik internasional.

Pemerintah daerah sekarang ini yang sudah mempunyai neraca daerah sekitar 169 wilayah daerah sesuai dengan asistensi dari BPKP yang merupakan anggota dari Tim Pokja 355/2001. Sebuah tonggak sejarah yang menguntungkan pemerintah daerah dan juga pemerintah tingkat pusat. Neraca tersebut membuat laporan pertanggung jawaban keuangan daerah lebih kredibel dan juga transparan untuk publik.

B. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Prinsip dasar yang diterapkan oleh pemerintah daerah kala melakukan penyusunan laporan keuangan yang tersaji menjadi laporan neraca, laporan arus kas dan juga perhitungan realisasi anggaran ini mengacu pada SAKD dari Tim Pokja SK Menkeu 355/2001, Keputusan Kementerian Menteri Dalam Negri 29/2002 dan juga praktek akuntansi seperti Government Finance Statistic yang terdiri dari:

1. Asas Kas

Pendapatan daerah ketika penerimaan kas daerah di dalam tahun anggaran pada periode tertentu, diakui pada saat pengeluaran kas daerah terjadi. Prinsip ini ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan UU Perbendaharaan Indonesia dan juga PP 105 Tahun 2000. Undang-Undang tahun 17/2003 yang mengatur mengenai Keunangan Negara Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya pengukuran pendapatan belanja dengan basis akrual yang belum dilaksanakan, digunakan pengukuran dengan basis kas. Masa transisi ini dilakukan sekurangnya 5 tahun sejak UU ini diberlakukan.

2. Asas Bruto

Asas bruto adalah kompensasi yang terjadi diantara pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan dan belanja

daerah ini akan dibukukan pada pos belanja yang bersangkutan tersebut.

3. Asas Universalitas

Semua pengeluaran harus berada di dalam laporan anggaran yang berarti menjadi batas komitmen tertinggi bagi pemerintah daerah yang bisa membebani APBD.

4. Nilai Sejarah

Penilaian atas aset tetap daerah menggunakan sistem nilai sejarah atau historis yang disajikan di dalam neraca yang tidak memperhitungkan akan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Penilaian pada neraca awal tersebut dilakukan melalui kegiatan secara fisik seperti inventarisasi pada semua aset daerah. Kendala yang biasa terdapat pada penyusunan tersebut yaitu:

- a. Dokumen historis dari semua aset APBN yang diserahkan kepada masing-masing daerah yang tidak bisa ditemukan
- b. Aset berupa fisik yang tidak tercatat di dalam daftar aset, serta dikuasai oleh pihak ketiga, belum memiliki kelengkapan dokumen.
- c. Bangunan bersejarah atau *heritage* masuk ke dalam neraca sebagai aset daerah yang bernilai tinggi.
- d. Sumber daya alam dimasukkan ke dalam aset daerah yang juga mencerminkan kekayaan real yang dimiliki oleh daerah.

5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang ada di daerah terhadap kendala yang dihadapi tersebut, memiliki beberapa aspek yang terdiri dari:

- a. Aset seperti bangunan dan uga tanah yang mengalami kesulitan dalam hal nilai historis, maka dilakukan penilaiannya oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai dinas terkait.

Untuk aset berupa tanah sendiri akan memakai NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak yang ditentukan langsung oleh Dirjen Pajak berdasarkan tahun perolehan.

Lalu untuk bangunan akan dilakukan penilaian dari Dinas Teknis yang bersangkutan berdasarkan kondisi dari bangunan tersebut.

- b. Depresiasi aset tetap tidak akan dilakukan disebabkan pemerintah daerah bukanlah organisasi yang

- berhubungan dengan profit atau laba. Dan depresiasi aset akan dilakukan dengan jalan penghapusan dari hasil inventaris yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- c. Aset historis dan sumber daya alam sendiri memiliki unsur ketidak pastian. Hal ini disebabkan nilai ekonomis dan juga ekspertis yang cukup mahal guna menilai kandungan sumber daya alam tersebut.
6. Neraca daerah
Neraca daerah akan menggunakan sistem *classified balance sheet* yang dikategorikan menjadi aset tidak lancar dan juga aset lancar beserta ekuitas dana bagi kelompok penyeimbang.
 7. Struktur APBD
Struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini akan diklasifikasikan secara ekonomi yang didalamnya terdapat belanja operasi dan juga modal serta belanja-belanja lain yang sesuai dengan PP 105/2000.

C. PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem akuntansi pemerintah daerah ini merupakan proses dari pencatatan, klasifikasi dan juga peringkasan semua transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah tingkat daerah dan juga laporan dalam hal pertanggung jawaban dari pendapatan dan juga belanja di pemerintah tingkat daerah.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 dan juga Keputusan Kementrian Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 menyajikan pendekatan baru di dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Perubahan ini dilakukan dengan cara bertahap yang tentu saja membutuhkan waktu lama di dalam proses implementasi tersebut. Keputusan Kementrian Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 yang mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini bisa dijelaskan seperti berikut ini:

1. Bab V mengenai Penatausahaan Keuangan Daerah ini akan mengatur mengenai fungsi otorisasi keuangan daerah dalam hal pengelolaannya pada Pasal 31 hingga 42. Yang memegang peranan dalam otorisasi tersebut adalah:
 - a. Kepala Daerah yang menjadi pemegang kekuasaan umum
 - b. Bendahara Umum Daerah
 - c. Pengguna Anggaran

d. Pemegang kas

2. Pasal 43 ayat (1) berisi mengenai pengaturan dokumen yang dipakai guna merekam data transaksi keuangan daerah. Hal ini juga tersaji dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1).
3. Pasal 44 hingga 64 berisi mengenai prosedur penerimaan kas dan juga sistem serta prosedur pengeluaran kas dan kebijakan pengadaan barang dan jasa.
4. Pasal 65 hingga 69 berisi mengenai prinsip manajemen aset daerah yang akan berimplikasi kepada Neraca Pemerintah tingkat Daerah.
5. Pasal 70 dan 71 akan mengatur mengenai sistem akuntansi dan juga kebijakannya.
6. Pasal 72 dan juga 77 berisi mengenai catata di dalam proses tata usaha keuangan daerah yang terdiri dari buku jurnal, buku besar dan juga buku pembantu.
7. Pasal 78 berisi mengenai bentuk sistem dan prosedur akuntansi yang berfungsi sebagai organisasi dokumen dan catatan keuangan
8. Pasal 79 hingga 85 ini mengaur mengenai bentuk laporan dan mekanisme pertanggung jawaban keuangan daerah.
9. Pasal 96 hingga 1010 mengatur pengawasan keuangan daerah.

Sistem laporan keuangan daerah ini tentu saja kualitasnya mendapatkan pengaruh dari beberapa andal dari sistem akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sistem ini merupakan kumpulan dan gabungan dari subsistem yang memiliki beberapa tahap, prosedur dan juga perangkat serta peraturan di dalam rangka untuk mencatat data keuangan dan juga mengolah data-data tersebut tagar menjadi laporan keuangan yang bisa dibaca oleh berbagai pihak termasuk publik.

Tujuan dari sistem akuntansi pemerintah daerah ini tentu saja untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas di sektor pelaporan, mendukung operasi harian yang rutin dilakukan, meningkatkan kualitas laporan dan pengambilan keputusan, meningkatkan sisi akuntabilitas di sektor finansial dan juga melindungi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Sistem akuntansi ini memiliki kaitan yang cukup erat dalam sistem pengendalian internal di organisasi. Dan sistem akuntansi yang memiliki kandungan sistem yang memadai di sektor pengendalian, merupakan sistem yang bagus. Sementara sistem

pengendalian intern ini merupakan proses integral dari tindakan dan juga kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif manajemen yang bertujuan sebagai pemberian jaminan dan juga keyakinan akan tujuan organisasi yang bisa dicapai dengan cara efisien dan juga efektif. Keandalan dalam pelaporan keuangan, aset negara, dan ketaatan mengenai peraturan perundang-undangan tersebut. Tujuan dari sistem pengendalian intern ini yaitu:

1. Guna melindungi aset negara dan daerah
2. Memelihara catatan laporan secara akurat dan terperinci
3. Menghasilkan informasi keuangan yang relevan, akurat dan juga andal
4. Menjamin bahwa laporan tersebut disusun berdasarkan standar dari sistem yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintah.
5. Operasi yang jauh lebih efisien dan efektif
6. Menjamin ketaatan dari kebijakan manajemen dan peraturan yang berlaku.

Komponen dari sistem pengendalian intern ini sudah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimana terdapat 5 komponen penting di dalamnya:

1. Lingkungan Pengendalian
Pemimpin dari sebuah instansi pemerintah dan juga semua pegawai tersebut harus menciptakan dan juga memelihara lingkungan di semua keseluruhan organisasi yang bisa menciptakan perilaku yang mendukung manajemen melalui beberapa langkah seperti:
 - a. Penegakan etika dan integritas
 - b. Komitmen tinggi kepada kompetensi
 - c. Kepimpinan kondusif
 - d. Struktur organisasi yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang tepat dan sesuai
 - f. Penerapan kebijakan yang disusun secara sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia
 - g. Peran aparat dalam pengawasan intern yang efektif
 - h. Hubungan kerja yang baik.
2. Penilaian resiko

Pengendalian intern ini harus menyajikan penilaian atas resiko yang harus ditanggulangi baik dari dalam dan juga luar organisasi atau lembaga.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan ini akan membantu dalam memastikan bahwasanya arahan dari pimpinan instansi pemerintah bisa dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini tentu saja harus disajikan dengan efektif dan juga seefisien mungkin agar tujuan organisasi bisa tercapai. Kegiatan pengendalian ini sendiri terdiri dari:

- a. Review mengenai kinerja instansi pemerintah
- b. Pembinaan SDM
- c. Pengendalian dari sistem informasi yang dikelola
- d. Review mengenai indikator dan juga ukuran kerja
- e. Pemisahan fungsi dan juga wewenang
- f. Otorisasi serta transaksi pada kejadian yang cukup penting
- g. Pencatatan yang akurat dan juga tepat waktu mengenai kejadian dan juga transaksi tersebut
- h. Pembatasan akses atas sumber daya dan juga catatannya
- i. Akuntabilitas mengenai sumber daya
- j. Dokumentasi pada Sistem pengendalian Intern dan juga transaksi yang penting.

4. Komunikasi dan Informasi

Informasi harus dilaporkan kepada pimpinan instansi dan juga pihak lain yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Informasi yang ditampilkan dan dilaporkan ini memungkinkan pemimpin untuk melaksanakan pengendalian dan juga tanggung jawabnya.

5. Pemantauan

Proses pemantauan ini bisa menilai dari kualitas kerja dari masa ke masa yang juga menjadi rekomendasi hasil audit dan review yang bisa ditindak lanjuti.

Otorisasi pada sistem akuntansi pemerintah daerah tentu saja memiliki peran yang cukup penting. Jika otorisasi tidak dijalankan dengan baik, tentu saja keuangan daerah memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi akan rawan bocor. Sistem otorisasi tersebut akan menampilkan ketentuan mengenai orang dan juga pejabat yang memiliki tanggung jawab guna mengotorisasi di pemerintah daerah.

Otorisasi ini memiliki bentuk kewenangan dan juga menyajikan tanda tangan di formulir dan juga dokumen tertentu. Tanpa adanya otorisasi dari pihak berwenang tersebut, maka transaksi tidak akan mungkin terjadi. Jika terjadi transaksi, maka proses tersebut ilegal dan tidak sah. Sistem otorisasi tersebut ditetapkan oleh kepala daerah yang bertugas sebagai pemegang kekuasaan dan menetapkan keputusan mengenai:

- a. Wewenang untuk penandatanganan Surat Penyediaan Dana atau SPD
- b. Wewenang mengenai penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran atau SPP
- c. Wewenang guna menandatangani Surat Perintah Membayar atau SPM.
- d. Wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.
- e. Wewenang mengesahkan Surat Pertanggung jawaban atau SPJ.
- f. Wewenang mengelola permintaan dan pengeluaran kas daerah yang disebut Bendahara Umum Daerah.
- g. Pelaksanaan kegiatan kebendaharawanan dalam pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Wewenang guna menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah dan juga Surat Bukti Penerimaan kas serta bukti pendapatan lainnya.
- i. Ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kepala Daerah memiliki wewenang guna menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga mekanisme pengaturan pencairan dana agar setiap kegiatan tersebut disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA-SKPD. Struktur organisasi pengelola tersebut akan tersaji sebagai berikut:

1. Kepala SKPD akan bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Daerah
2. Bendahara akan terdiri dari:
 - a. Bendahara penerimaan yang dibantu oleh:
 - Bendahara Pembantu Penerimaan
 - Pencatat Pembukuan atau Juru Buku
 - Penyimpanan Uang
 - b. Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh:
 - Kasir pembayar

- Pembuat dokumen Pengeluaran atau Pencatat Pembukuan
 - Bendahara Gaji Pegawai.
3. Pemegang Barang
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terdiri:
 - a. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Panitia Penerimaan dan Pemeriksa Barang
 - c. Staf Teknis
 - d. Staf Administrasi.

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah ini tentu saja harus diiringi bukti pendukung sebagai transaksi yang sah dan juga valid. Bukti tersebut tentu saja bisa menjadi catatan untuk masuk ke dalam Buku Catatan Akuntansi. Kelengkapan formulir tersebut memiliki peran yang sangat penting guna melakukan proses audit keuangan tersebut. Formulir dan juga dokumen transaksi yang dipakai oleh pemerintah daerah guna mencatat transaksi tersebut adalah:

1. Perda APBD
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Angkatan Kerja Perangkat Daerah atau DPA – SKPD
3. Surat Penyediaan Dana atau SPD
4. SPP atau Surat Permintaan Pembayaran
5. Surat Perintah Membayar atau SPM
6. Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D
7. Surat Tanda Setoran atau STS
8. Kuitansi.

Sementara buku catatan akuntansi yang digunakan pada pencatatan keuangan tersebut adalah Buku Jurnal, Buku Besar dan juga Buku Pembantu yang terbagi menjadi:

1. Buku Jurnal
 - a. Buku Jurnal Umum
 - b. Buku Jurnal Penerimaan Kas
 - c. Buku Jurnal Pengeluaran Kas
2. Buku Besar
3. Buku Pembantu
 - a. Buku Kas Umum
 - b. Buku Register
 - c. Buku Rekapitulasi
 - d. Buku Bank
 - e. Buku Pajak
 - f. Buku Panjar.

Fungsi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan akuntansi terutama pada proses transaksi memang harus terpisah agar tidak tercampur dalam pelaksanaan kewenangannya. Transaksi di awal hingga akhir tidak boleh diatasi oleh satu fungsi atau 1 divisi semata. Pemisahan fungsi pemegang uang dan juga pencatat uang harus berbeda dan memiliki otoritas tersendiri. Dan pemisahan tugas ini akan mempermudah pencatatan sehingga terhindar dari manipulasi, kolusi dan juga korupsi.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini merupakan proses pencatatan dan juga klasifikasi serta ringkasan mengenai transaksi keuangan dan juga pelaporan dalam hal pertanggung jawaban akan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sistem akuntansi ini memiliki peran yang penting guna menjamin konsistensi dalam hal pelaporan keuangan yang bisa menjadi acuan guna menyajikan informasi yang pas dalam pelaporan keuangan daerah. Selain itu sistem akuntansi bisa menyajikan data semua aktifitas keuangan dan transaksi yang terjadi, agar transparan dan juga kredibel. Sistem akuntansi pemerintah di tingkat daerah ini dilaksanakan dengan 2 sub sistem yang terdiri dari:

1. Subsistem akuntansi pemerintah daerah atau SKPD yang bertugas melakukan pencatatan transaksi pada tingkat Pemerintah Daerah.
2. Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah atau SKPKD yang bertugas melakukan pencatatan transaksi yang ada di dalam satuan kerja

D. PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini menjadi bagian dari proses pengaturan pencatatan keuangan daerah yang dilakukan secara menyeluruh. Hal ini tentu saja menjadi dasar bagi pertimbangan hukum yang ada di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan juga UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah tingkat Daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan pemerintah yang memiliki proses pengumpulan data, pencatatan dan juga ikhisar hingga akhirnya melakukan laporan keuangan dalam pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan APBD. Dan SAPD tersebut mempunyai karakteristik yang terdiri dari:

1. Basis Akuntansi

Basis kas dalam pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran atau LRA dan juga basis Akrua menjadi basis ini guna melakukan pelaporan. Basis akrua digunakan untuk neraca keuangan. Basis kas ini digunakan agar pendapatan diakui dan juga dicatat agar diterima oleh rekening Kas Daerah. Begitu pula belanja daerah yang diakui dan juga dicatat ketika terjadi transaksi dari rekening kas daerah.

2. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem ini memiliki dasar persamaan dalam dasar akuntansi yang artinya Aset sama dengan Utang dan juga Ekuitas Dana. Dan setiap transaksi yang terjadi ini akan dibukukan dengan cara mendebit perkiraan dan mengkredit perkiraan lain.

SAPD juga menyajikan beberapa prosedur akuntansi mengenai penerimaan kas dan juga pengeluaran serta prosedur aset tetap dan barang milik daerah. Dan terdapat 2 subsistem dalam SAPD yang terbagi menjadi:

1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem ini akan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD yang mencatat semua transaksi yang terjadi di pemerintahan tingkat daerah. Proses pencatatan seperti pendapatan dana, belanja bunga, subsidi, hibah hingga bantuan sosial dan juga bantuan keuangan, menjadi pencatatannya. Begitu pula dengan transaksi pembiayaan, pencatatan investasi dan juga utang jangka panjang.

2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sistem ini akan dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan keuangan atau PPK SKPD dimana pencatatan mengenai transaksi akan terjadi pada lingkungan satuan kerja dan juga harus dilaporkan oleh PPK SKPD.

E. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Basis akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah ini seperti halnya basis akuntansi pada keuangan negara yang berarti basis kas guna pengakuan pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. Laporan keuangan pemerintah tingkat daerah ini seperti halnya laporan keuangan pada pemerintah pusat yang terdapat beberapa komponen seperti:

1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA yang merupakan singkatan dari Laporan Realisasi Anggaran ini akan menampilkan ikhtisar sumber, alokasi dan juga pemakaian dana keuangan yang dikelola pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Laporan ini akan menampilkan perbandingan anggaran dan juga realisasinya dalam 1 periode laporan tersebut. Laporan ini adalah bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan APBD dari pemerintah daerah yang mencakup sumber pendanaan dan juga alokasi dana serta pemakaian sumber ekonomi tersebut.

2. Neraca

Neraca menampilkan entitas pelaporan mengenai kewajiban, aset, ekuitas pada periode tertentu. Unsur yang mengatur ke dalam neraca tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

- d. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah dari peristiwa masa lalu yang memberikan manfaat di sektor ekonomi dan juga sosial yang bisa membantu pemerintah di masa depan. Dan aset ini bisa diukur dalam satuan uang.
- e. Kewajiban merupakan utang yang terjadi karena peristiwa masa lalu yang diselesaikan dari aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
- f. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang menjadi selisih antara aset dan juga kewajiban pemerintah tersebut.

3. Laporan Operasional

Laporan ini akan menampilkan ikhtisar sumber daya ekonomi yang akan menambah ekuitas dimana pemerintah daerah yang mengelola ekuitas tersebut. Hal ini tentu saja untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah di dalam 1 periode laporan. Unsur yang terkandung di dalam Laporan Operasional ini sebagai berikut:

- e. Pendapatan merupakan hak dari pemerintah yang disebut sebagai nilai kekayaan bersih.
- f. Beban merupakan kewajiban pemerintah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- g. Transfer merupakan hak penerimaan dan juga kewajiban pengeluaran dari entitas pelaporan dimana dana perimbangan dan bagi hasil termasuk di dalamnya.

- h. Pos Luar biasa merupakan pendapatan dan beban luar biasa yang terjadi disebabkan operasi luar biasa yang tidak terkendali.
- 4. Laporan Arus Kas
Laporan tersebut menampilkan informasi yang berhubungan dengan kas dan juga aktifitas operasi, investasi dan juga pendanaan. Unsur yang terdapat di dalam laporan arus kas ini sebagai berikut:
 - c. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke dalam Bendaraha Umum Daerah
 - d. Pengeluaran kas yaitu semua kas yang keluar dari Bendaharan Umum Daerah.
- 5. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini akan menampilkan informasi mengenai kenaikan dan penurunan ekuitas pada laporan tahunan
- 6. Catatan Atas Laporan Keuangan
Sebuah laporan yang akan meliputi penjelasan secara naratif dan juga rincian yang terdapat di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional dan juga Laporan Perubahan Ekuitas dan juga Neraca serta Arus Kas. Catatan ini akan menyajikan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut.
- 7. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
Laporan ini akan menyajikan informasi mengenai kenaikan dan juga penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan yang akan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menginformasikan penggunaan dana yang tersisa guna menutup anggaran yang kurang agar bisa berjalan dengan baik.

Sistem akuntansi pemerintah daerah menjadi salah satu sistem akuntansi yang cukup baik dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan daerah yang berfungsi sebagai akuntabilitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran belanja daerah dan juga yang berhubungan dengan keuangan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
- Baldrick dan Bonni Siregar, Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana, Edisi 2, STIE YKPN: Yogyakarta, 1996
- Bambang kesit, Akuntansi Pemerintah Teory dan Praktek, modul perkuliahan.
- Baswir, Revrisond. 1992. Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan daerah (BAKD), Depdagri.2006. sosialisasi permendagri nomor 13. Tahun 2006
- Halim, Abdul, Muhammad Syam Kusufi 2014, Teori, Konsep dan aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto, Sahmuddin, Arifuddin, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset
- Hessel Nogi D.Tangkilisan. Manajemen Publik. 2005. Jakarta : Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Jakarta: Jurnal Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Laporan Keuangan Pengertian dan Dasar-Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Jurnal Manajemen, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Bahan Kuliah Manajemen.
- Laporan keuangan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
- Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi S P, Maulidah R. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi S.P., Maulidah R. Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Nordiawan, Dedi dkk. 2009. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah

Permendagri no 64 tahun 2013 tentang tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Srijanti, A. Rahman. Etika Berwarga Negara. 2007. Jakarta : Salemba Empat.

Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. 2013. Jakarta : BPFE Yogyakarta

Syadza, Abine. Gambaran Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat . Abine Syadza lagi belajar.htm

BUKU AJAR

AKUNTANSI PEMERINTAH

Syahrijal Hidayat, S.E., M.Ak

Di era globalisasi sekarang ini dituntut untuk meningkatkan performa untuk menuju ke persaingan tingkat dunia yang sudah semakin ketat. Tuntutan reformasi yang semakin hari semakin meningkat, tentu berpengaruh kepada semua bidang. Tidak terkecuali akuntansi. Berfungsi sebagai alat pencatatan keuangan, tentu saja akuntansi semakin dibutuhkan bukan hanya untuk pihak manajemen entitas tertentu, namun juga sebagai akuntabilitas kepada semua pihak yang membutuhkan. Di dunia bisnis, akuntansi memiliki peran yang sangat penting. Dan sekarang ini sudah berkembang seiring dengan dunia bisnis yang terus berkembang mengikuti jaman.

Sementara perkembangan dunia akuntansi pemerintahan tidak secepat dunia bisnis yang terus bergerak dan juga berubah. Hal ini disebabkan dengan karakteristik yang seolah berjalan di tempat dan tidak mengalami perubahan. Tuntutan masyarakat tentu saja membuat akuntansi pemerintah harus lebih baik dan juga berubah mengikuti jaman. Apalagi semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, membuat tuntutan akuntabilitas keuangan yang menjadi perwujudan transparansi keuangan di dalam pemerintahan harus lebih baik.



Penerbit

PT Inovasi Pratama Internasional

www.ipinternasional.com